

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah selesai disusun dengan baik.

Di dalam era Reformasi yang serba transparan ini, kita dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatan sebagai indikator sasaran strategis yang mempergunakan uang negara. Secara berkala, pengukuran capaian sasaran strategis dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan salah satu aspek dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP ini dilaporkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang uraian keberhasilan maupun ketidakberhasilan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Di samping itu, LAKIP ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2012. Di samping itu, melalui LAKIP ini pula, pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Akhir kata, semoga LAKIP Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 ini dapat memberikan manfaat, khususnya tentang penyampaian informasi maupun evaluasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2013  
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Surya Helmi  
19530406 198403 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
<b>Bab I      Pendahuluan</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	4
<b>Bab II     Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	11
C. Penetapan Kinerja .....	12
<b>Bab III    Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Analisis Capaian Sasaran .....	14
B. Akuntabilitas Keuangan .....	35
<b>Bab IV    Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Rekomendasi dan Saran .....	39

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan LAKIP pertama dalam Rencana Strategis Kementerian setelah bergabung kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Oktober tahun 2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berisi laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2012 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Seperti diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berkaitan dengan pergeseran dan penempatan Menteri dan Wakil Menteri baru, sekaligus mengubah nomenklatur, tugas fungsi, dan kinerja dua kementerian baru pada Bulan Oktober 2011, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan bidang kebudayaan masuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran Eksisting (APBN) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman masih berada pada DIPA Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penambahan (APBNP), seluruh DIPA dari Direktorat Pelestarian cagar Budaya dan Permuseuman sudah berada di bawah Kementerian dan Kebudayaan, sehingga LAKIP perlu disusun pula sesuai dengan panduan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan nomenklatur ini juga membawa dampak yang kompleks, tidak hanya menyangkut penyesuaian tugas dan fungsi di masing-masing lembaga, melainkan juga terkait penyesuaian administrasi perkantoran, personalia, konsekuensi anggaran, dan urusan lainnya. Namun demikian, telah dibentuk tim yang bekerja untuk melakukan penataan fungsi, personalia, dan asset yang terkait dengan perubahan nomenklatur tersebut.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2012 berisi program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan di bidang cagar budaya dan permuseuman yang terkait dengan kegiatan pelestarian yang meliputi 3 eks Direktorat gabungan, yaitu Direktorat Tinggalan Purbakala, Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, serta Direktorat Museum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2012 menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam lima sasaran strategis. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah 1) Peningkatan pelestarian Cagar budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBNP didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.650.000.000; (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut belum termasuk anggaran Tugas Pembantuan kepada 9 Pemerintah Daerah sebesar Rp. 42.550.000.000; (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Capaian realisasi dari alokasi anggaran yang diberikan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah sebesar Rp. 70.502.000.000; (tujuh puluh milyar lima ratus dua juta rupiah) dengan presentase capaian 52,7%. Pencapaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan waktu yang ada, yaitu kurang lebih hanya 4 bulan saja. Untuk alokasi anggaran Tugas Pembantuan kepada 9 daerah Penerima Anggaran, akuntabilitasnya dilaporkan oleh masing-masing Daerah tersebut. Sedangkan untuk APNB, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.224.748.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan penyerapan anggarannya sebesar Rp.16.433.529.000,-(enam belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 70,8%.

Secara umum dapat dilaporkan pula bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama tahun 2012 telah memenuhi sasaran strategis yang ditetapkan. Namun, untuk realisasi beberapa Indikator tidak dapat terlaksana, sebab dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang muncul. Kendala dan permasalahan yang paling besar adalah pergeseran organisasi yang dialami oleh Bidang Kebudayaan, dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tengah-tengah tahun anggaran.

Konsekuensi logis yang dihasilkan adalah ketidakmampuan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam menyelesaikan seluruh kegiatan APBN yang notabene merupakan gabungan dari 3 Direktorat lama dan ditambah lagi dengan kegiatan APBNP yang jumlah anggarannya lebih dari 5 kali lipat anggaran gabungan 3 Direktorat lama pada APBN. Ketidakmampuan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan seluruh kegiatan tersebut selain disebabkan karena waktu, tentunya disebabkan faktor sumber daya manusia. Jumlah SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kurang memadai dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut. Jumlah SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tidak sebanding dengan kegiatan yang diampu, sebab kegiatan gabungan dari 3 Direktorat dilaksanakan oleh hanya sepertiga SDM nya saja.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil evaluasi internal yang kami lakukan selama satu tahun ini, kami dapat merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2013 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

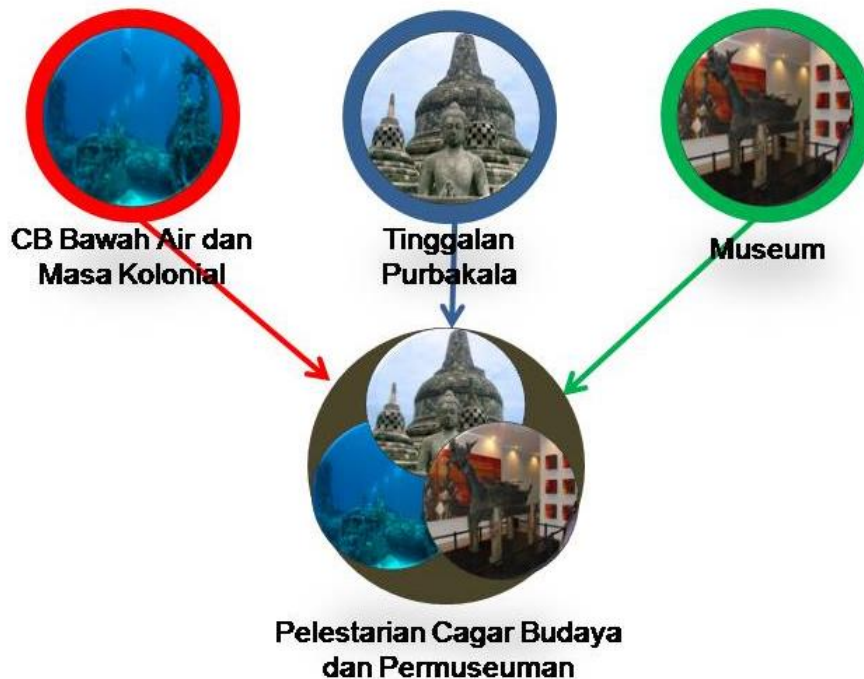
### **A. GAMBARAN UMUM**

Saat ini bidang kebudayaan berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Sedangkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) yang dulu mengampu kebudayaan, diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf). Perubahan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011.

Perubahan nomenklatur ini membawa dampak yang tidak sederhana, tidak hanya menyangkut penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing lembaga, melainkan juga terkait penyesuaian administrasi perkantoran, sumber daya manusia, konsekuensi anggaran, dan urusan lainnya. Namun demikian, telah dibentuk tim yang bekerja untuk melakukan penataan fungsi, sumber daya manusia, dan aset yang terkait dengan perubahan nomenklatur tersebut. Selain itu juga dilakukan penyusunan struktur dan program kelembagaan baru yang akan menjadi panduan penetapan rencana strategis (renstra) Kementerian.

Dengan perubahan tersebut di atas, maka salah satu konsekuensinya adalah struktur organisasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berubah. Hal ini disebabkan oleh terbentuk Unit Utama baru, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat 5 Direktorat sebagai hasil dari restrukturisasi Direktorat-Direktorat lama di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan *merger* dari 3 Direktorat lama, yaitu 1) Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, 2) Direktorat Tinggalan Purbakala, dan 3) Direktorat Museum. Dengan terbentuknya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dari 3 Direktorat lama, maka terjadi penyesuaian di semua aspek, terutama aspek Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Penyesuaian ini memang sangat berat, apalagi pembentukan Direktorat baru terjadi di tengah tahun anggaran yang sedang berjalan, terlebih lagi dengan diturunkannya APBNP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Anggaran yang jumlahnya lebih dari 5 kali lipat dari APBN gabungan 3 Direktorat lama. Namun demikian, dengan kerja keras dan etos kerja yang tinggi dari seluruh pegawai, penyesuaian tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam membangun pilar kebudayaan dapat berjalan dengan lancar.

Ada lima pilar pembangunan kebudayaan Indonesia dalam cetak biru pembangunan nasional atau buku panduan nilai kebudayaan, yang terdiri dari lima pilar pembangunan kebudayaan Indonesia, yaitu 1) karakter bangsa, 2) pelestarian budaya, 3) penguatan karya dan diplomasi budaya, 4) sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, dan 5) pilar sarana dan prasarana budaya.



*Ilustrasi Penggabungan 3 Direktorat lama menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman*

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, memiliki peran strategis dalam rangka pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) cagar budaya dan museum yang sekaligus menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat dalam rangka penguatan pelestarian cagar budaya dan museum.

Upaya-upaya penanaman nilai-nilai sejarah dan pelestarian cagar budaya menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jati diri bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, upaya pelestarian tersebut juga memiliki manfaat ideologis, akademis, dan ekonomis sebagai kekayaan dan kearifan intelektual bangsa di masa lampau. Untuk itu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang cagar budaya dan pemuseuman. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010)**

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009 telah membuahkan hasil yang menggembirakan, khususnya kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa

Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dalam RPJMN 2010-2014 termuat salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan dalam prioritas 11 adalah Penetapan dan Pembentukan Pengelolaan Terpadu Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Dunia dan Revitalisasi Museum.

## **Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dimaksudkan untuk:

- a. melaporkan kegiatan tahun 2012;
- b. memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012;
- c. memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 dengan beberapa indikator yang terukur

Laporan akuntabilitas memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2012 dengan realisasi outputnya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2012 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

### **Tujuan**

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.



## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012;
9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;
10. Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014;

## **C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Peran dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi untuk :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- d. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. mengelola register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air;



- f. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengevaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Direktorat. Adapun masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

### **1) Subdit Program dan Evaluasi**

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kegiatan Direktorat; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

### **2) Subdirektorat Registrasi Nasional**

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan register nasional serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang registrasi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 555, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan data registrasi nasional cagar budaya dan koleksi museum;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional;
- d. pengelolaan register nasional;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data; dan

- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data.

### **3) Subdirektorat Pelindungan**

Subdirektorat Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 559, Subdirektorat Pelindungan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelindungan;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya dan permuseuman.

### **4) Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan**

Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman.

### **5) Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi**

Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, eksplorasi cagar budaya bawah air serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 567, Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan eksplorasi cagar budaya di air;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum.

## **6) Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

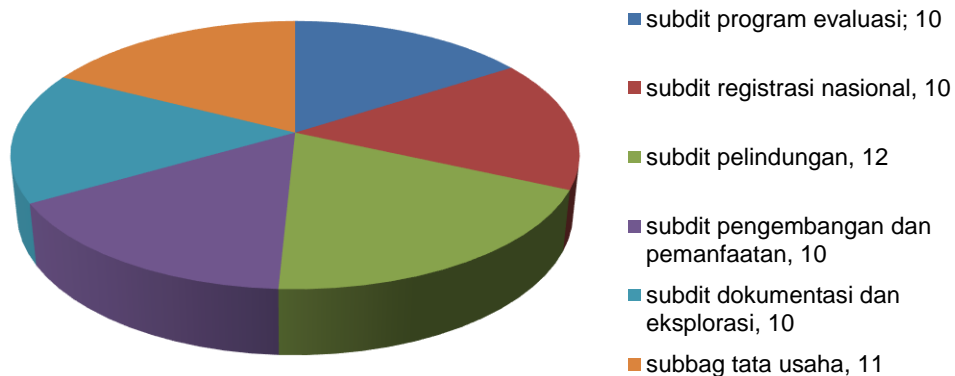
Selain unit kerja tersebut di atas, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi NAD dan Sumatera Utara;
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
- 3) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 4) Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
- 5) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 7) Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
- 8) Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;
- 9) Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- 10) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- 11) Balai Konservasi Borobudur;
- 12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
- 13) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
- 14) Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- 15) Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta
- 16) Museum Sumpah Pemuda, Jakarta
- 17) Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
- 18) Museum Basoeeki Abdullah, Jakarta
- 19) Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

## Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Jumlah SDM di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 64 orang dengan uraian sebagai berikut:

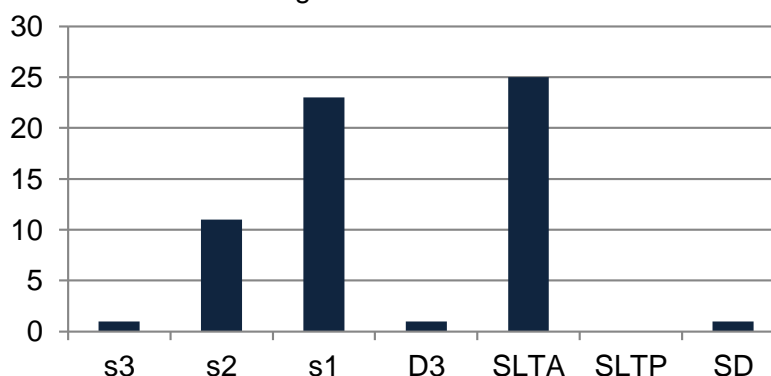
- |  |            |
|--|------------|
| 1) Direktur                            | : 1 orang  |
| 2) Subdit Program dan Evaluasi         | : 10 orang |
| 3) Subdit Registrasi Nasional          | : 10 orang |
| 4) Subdit Pelindungan                  | : 12 orang |
| 5) Subdit Pengembangan dan Pemanfaatan | : 10 orang |
| 6) Subdit Eksplorasi dan Dokumentasi   | : 10 orang |
| 7) Sub Bagian Tata Usaha               | : 11 orang |



*Komposisi Pegawai masing-masing SubDirektorat*

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki sumberdaya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan tingkat pendidikannya:

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1) Purna Sarjana | : 1 orang  |
| 2) Pasca Sarjana | : 11 orang |
| 3) Sarjana       | : 24 orang |
| 4) Sarjana Muda  | : 1 orang  |
| 5) SLTA          | : 25 orang |
| 6) SLTP          | : - orang  |
| 7) SD            | : 1 orang  |



*Komposisi pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman*

## **BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Hingga akhir tahun 2012, Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman belum disusun. Hal ini disebabkan karena belum sempurnanya Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menjadi payung acuan bagi penyusunan Renstra Satuan Kerja di bawahnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya yang berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak dari tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis ke arah mana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula.

Visi dan misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pun juga masih menggunakan visi misi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang di dalamnya telah memuat visi dan misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

#### **1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Memperkokuh Kebudayaan Indonesia yang Multikultur, Bermartabat, dan Menjadi Kebanggaan Masyarakat dan Dunia”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 Misi, yaitu:

- 1)** Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
- 2)** Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa;
- 3)** Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
- 4)** Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
- 5)** Internalisasi nilai untuk membentuk jatidiri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;

- 6) Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan di Indonesia.

## **2. Tujuan dan Sasaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Berdasarkan salah satu misi bidang Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut ini:

### **a. Tujuan:**

- 1) Peningkatan pelestarian Cagar Budaya Indonesia
- 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia
- 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum

### **b. Sasaran:**

- 1) Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan
- 2) Meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi
- 3) Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
- 4) Meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat

## **3. Kebijakan dan Program Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

### **a. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah Peningkatan Kualitas Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka melaksanakan arah Peningkatan Kualitas Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman, maka ditempuh *strategi* sebagai berikut :

1. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesenjajaran.
3. Peningkatan revitalisasi museum (fisik bangunan dan sarana prasarana pendukung)
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum (koleksi dan interpretasi)

### **b. Kegiatan**

Sebagai pengimplentasian dari kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Kegiatan Pokok dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Adapun kegiatan pokok tersebut adalah:

1. Penyusunan Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
2. Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya secara Nasional
3. Revitalisasi Cagar Budaya dan Museum
4. Pendokumentasian Cagar Budaya dan Koleksi Museum
5. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2012. Pada tahun 2012 ini, tidak semua output dapat tercapu oleh indikator-indikator yang ditetapkan. Namun, output-output tersebut justru dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Adapun rincian dari RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik untuk APBN maupun APBNP dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 (APBN dan APBNP)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
S 1	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman	IKK 10.1.2	<b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar dan Ditetapkan Secara Nasional</b>	1.000 Cagar Budaya
				5.000 Cagar Budaya (APBN)
		IKK 10.1.3	<b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan</b>	5.000 Cagar Budaya
				2.530 Cagar Budaya (APBN)
		IKK 10.1.4	<b>Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi</b>	3 Cagar Budaya
				3 Cagar Budaya (APBN)
		IKK. 10.1.1	<b>Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum</b>	10 Naskah
				7 Naskah (APBN)
		IKK. 10.1.7	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	3 Naskah
				4 Naskah (APBN)



S 2	Meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia	IKK 10.1.5	<b>Jumlah Museum Yang Direvitalisasi</b>	17 Museum
		IKK 10.1.6	<b>Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi</b>	2 Museum (APBN)
				50.000 Koleksi
				0 (APBN)

### C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Program Pelestarian Budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian kekayaan budaya yaitu cagar budaya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang in situ maupun ex situ seperti di museum. Hal ini bertujuan agar aset budaya tinggi yang mengandung nilai-nilai positif dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kebudayaan serta dapat berfungsi lebih optimal untuk peningkatan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam kehidupan multikultural melalui berbagai aktifitas yang berkaitan dengan kebudayaan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan kegiatan-kegiatan yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan kontrak kinerja antara Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari output-output strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat.

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012:

*Tabel 2. PK Tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (APBN dan APBNP)*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp)
S.1	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan	IKK 10.1.2	<b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar Dan Ditetapan Secara Nasional</b>	1.000 Cagar Budaya	15.000.000.000
				5.000 Cagar Budaya (APBN)	1.7000.000.000

	cagar budaya dan permuseuman	IKK 10.1.3	<b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan</b>	5.000 Cagar Budaya	0
				2.530 Cagar Budaya (APBN)	250.000.000
		IKK 10.1.4	<b>Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi</b>	3 Cagar Budaya	0
				3 Cagar Budaya (APBN)	726.474.000
		IKK. 10.1.1	<b>Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum</b>	10 Naskah	0
				7 Naskah (APBN)	950.000.000
		IKK. 10.1.7	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	3 Naskah	600.000.000
				4 Naskah (APBN)	1.040.589.000
S.2	Meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia	IKK 10.1.5	<b>Jumlah Museum Yang Direvitalisasi</b>	17 Museum	17.000.000.000
				2 Museum (APBN)	1.370.598.000
		IKK 10.1.6	<b>Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi</b>	50.000 Koleksi	1.400.000.000
				0 (APBN)	0

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pada setiap akhir periode, suatu instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana target kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*) yang dicapai suatu organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gaps*) dan tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran/target atas setiap kegiatan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dinyatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sasaran/Target yang telah ditetapkan secara umum telah dapat terlaksana. Hal ini bisa dilihat dari sasaran/target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Namun demikian, terdapat pula beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, sebab ditemui kendala di dalam pelaksanaan kegiatannya, baik teknis maupun non teknis. Berikut ini akan disampaikan tabel pengukuran capaian kinerja Direktorat yang selanjutnya diuraikan secara lebih detail di bawahnya.

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 (APBN dan APBNP)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp)7	Realisasi			
						Kinerja	%	Anggaran (Rp)	%
S 1	Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya	IKK 10.1 .2	Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar Dan Ditetapkan Secara Nasional	1.000 Cagar Budaya	15.000.000.000	0	0	0	0
				5.000 Cagar Budaya	1.700.000.000	66.348	1327	1.617.405.000	95,1
		IKK 10.1 .3	Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumenta sikan	5.000 Cagar Budaya	0	0	0	0	0
				2.530 Cagar Budaya	250.000.000	13.073	261.5	230.756.000	92,3
		IKK 10.1 .4	Jumlah Cagar Budaya Bawah Air	3 Cagar Budaya	0	0	0	0	0

			<b>Yang Dieksplorasi</b>	3 Cagar Budaya	726.474.000	3		681.780.000	93,8
		IKK. 10.1 .1	<b>Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum</b>	10 Naskah	0	0	0	0	0
				7 Naskah	950.000.000	4	57	645.428.000	68
		IKK. 10.1 .7	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	3 Naskah	600.000.000	2	67	132.475.000	10
				4 Naskah	1.040.589.000	5	125	613.382.700	58,9
S . 2	Pengembangan dan peningkatan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan dan pelayanan Museum di Indonesia	IKK 10.1 .5	<b>Jumlah Museum Yang Direvitalisasi</b>	17 Museum	17.000.000.000	6	35	9.821.129.000	45
				1 Museum	1.000.000.000	1	100	922.773.500	92.3
		IKK 10.1 .6	<b>Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumenta si</b>	50.000 Koleksi	1.400.000.000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dilihat dari masing-masing output-output yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan:

### **Sasaran strategis 1:**

#### **Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman**

Sasaran strategis “meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman” capaian realisasinya didukung oleh lima Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

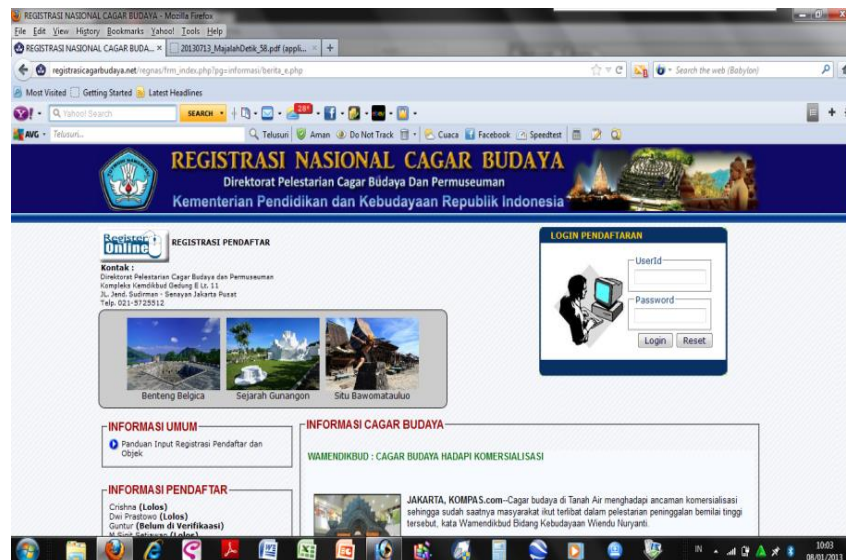
1. Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar Dan Ditetapkan Secara Nasional
2. Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan
3. Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi
4. Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
5. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Berikut akan diuraikan analisa capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis “meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman”.

## 1. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftarkan dan Ditetapkan Secara Nasional.

Untuk APBN-P, dari target 1.000 (seribu) cagar budaya yang didaftarkan, pencapaian kinerjanya adalah 0%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan APBN, di mana kegiatan APBN pun belum sempurna terlaksana. Salah satu kegiatan APBN yang belum sempurna terlaksana adalah pembuatan sistem registrasi/pendaftaran. Untuk saat ini, sistem sudah selesai dibuat, namun belum dapat melaksanakan pendaftaran secara Online, sebab masih menunggu sistem payungnya, yaitu website kebudayaan. Selain itu, pendistribusian alat ke daerah memerlukan waktu dan koordinasi yang cukup lama, sehingga pekerjaan ini tidak dapat terlaksana.



Tampilan Sistem Registrasi Nasional

Sedangkan untuk APBN, dari target 5.000 cagar budaya yang didaftarkan, justru tercapai 66.348 cagar budaya yang terdaftar. Perlu disampaikan di sini, bahwa kegiatan pada APBN yang berkenaan dengan pendaftaran cagar budaya adalah Pengolahan Data Registrasi Nasional Cagar Budaya mencakup pengolahan data pendaftaran cagar budaya yang telah masuk ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi atau Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) yang telah masuk sebelum disahkannya UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya. Data pendaftaran tersebut diolah untuk keperluan penetapan sebagai cagar budaya nasional sesuai UU No.11/2010. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan merekrut mahasiswa yang terlatih untuk mengolah data hasil pendaftaran dari kabupaten/kota. Pengolahan data registrasi nasional ini kegiatan pokoknya adalah *updating* data pendaftaran cagar budaya terkait ada tidaknya perubahan kondisi fisik dan lingkungan cagar budaya sehingga terjadi penurunan nilai cagar

budaya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi untuk dikriteriakan sebagai cagar budaya.

## **2. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan**

Target untuk Indikator Kinerja ini yang ditetapkan pada APBN-P sebanyak 5.000 cagar budaya yang didokumentasikan. Namun, setelah DIPA turun, ternyata tidak ada anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini. Hal ini berakibat pada capaian kinerjanya 0%. Dalam Penetapan Kinerja, seharusnya tidak perlu dicantumkan Indikator Kinerja ini jika tidak ada anggaran yang mendukung, sebab tidak ada anggaran yang mendukung. Namun, karena pada APBN terdapat output yang mendukung Indikator Kinerja ini beserta anggarannya, maka Indikator Kinerja ini harus muncul dalam Kontrak Kinerja.

Pada APBN target cagar budaya yang didokumentasikan adalah sebanyak 2.530 cagar budaya. Dari target yang ditetapkan, tercapai 13.073 cagar budaya yang didokumentasikan. Pencapaian angka yang sangat tinggi ini dicapai dari hasil kegiatan

- a. Pengalihan media peta/gambar kuno sebanyak 5.379 lembar
- b. Konservasi dan pengalihan media negatif kaca sebanyak 7.694 keping

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki dokumen tentang foto-foto tinggalan purbakala yang berasal dari masa pendudukan Pemerintah Belanda berupa negatif kaca, foto positif, abklat, gambar dan peta kuno. Sebanyak lebih dari 30.000 dokumen yang dikelola dan dilestarikan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman saat ini tersimpan dalam gedung penyimpanan dokumen purbakala yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No.14, Jakarta Pusat.

Sejak tahun 2008-2011 dokumen kepurbakalaan tersebut telah direinventarisasi dan dialih-mediakan. Hal ini dilakukan agar kelestarian data dapat terjaga karena dokumen tersebut telah berumur lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai historis yang tinggi. Selama tiga tahun telah dilakukan inventarisasi ulang, pemindaian, dan penataan ke dalam lemari penyimpanan koleksi, foto positif, abklat, sebagian koleksi peta/gambar dan sebagian negatif kaca. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan alih media dan konservasi negatif kaca dan peta/gambar kuno. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian data atau dokumen kepurbakalaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di bidang kepurbakalaan.

## **3. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi**

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya Bawah Air yang Dieksplorasi pada APBN-P tidak dapat dicapai, dengan kata lain capaian kinerjanya 0% dari 3 cagar budaya yang ditargetkan. Alasannya adalah sama dengan Indikator sebelumnya yaitu Jumlah Cagar Budaya yang Didokumentasikan, yaitu tidak ada anggaran yang dialokasikan pada APBNP. Sedangkan pada APBN, dari target 3



Cagar Budaya yang ditetapkan, tercapai 100%. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan yaitu Survei dan Pemetaan Cagar Budaya bawah air. Kegiatan survei dan pemetaan cagar budaya bawah air ini adalah kegiatan melakukan pencarian situs cagar budaya bawah air, untuk diidentifikasi dan dipetakan menjadi peta sebaran situs cagar budaya bawah air di perairan Indonesia. Lokasi yang dianggap memiliki potensi besar dan diadakannya kegiatan ini pada tahun 2012 berada di 3 lokasi yaitu Morotai Provinsi Maluku Utara, Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan Togean Provinsi Sulawesi Tengah.



*Temuan Cagar Budaya Bawah Air hasil survei pemetaan*

Hasil dari kegiatan tersebut adalah identifikasi 6 situs, yaitu situs kapal di Juanga, mobil jeep di Kapa-Kapa, pesawat di Pulau Amerika, kompleks situs berupa pesawat dan jeep serta truck di Wawama, kapal Jepang di Buha-Buha, situs di Morotai. Pesawat bomber di Togean Sulawesi Tengah, dan kapal pengangkut di Bintan.

#### **4. Indikator Kinerja Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum**

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum pada APBN-P tidak dapat tercapai. Sekali lagi capaian dari Indikator Kinerja ini adalah 0% dari 10 Naskah yang ditargetkan dengan alasan yang sama dengan 2 Indikator sebelumnya, yaitu tidak adanya anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja.

Sedangkan pada APBN, dari 7 naskah yang ditargetkan, tercapai 4 dokumen atau dengan prosentase sebesar 57,1%. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan-kegiatan dari 2 Direktorat lama, yaitu Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial dan Direktorat Museum. Sedangkan Direktorat Tinggalan Purbakala tidak mengadakan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini.

Adapun Naskah yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur Standar Pengangkatan BCB Bawah Air dan Ekskavasi Arkaeologi di Bawah Air
- b. Pedoman Perlindungan Cagar Budaya Masa Kolonial
- c. Penyempurnaan Pedoman Penilaian Koleksi Sebagai Kekayaan Negara
- d. Modul Bimbingan Teknis Bidang Permuseuman



## **5. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**

Pada APBN-P target Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi sebanyak 3 naskah dan tercapai 2 naskah atau 67%, yaitu naskah Perencanaan dan Naskah Monitoring dan Evaluasi. Naskah perencanaan berupa Rencana Kerja Tahunan Anggaran Pagu Sementara 2013, RAK-KL Pagu Definitif 2013, dan RKA-KL APBN-P 2012. Sedangkan untuk evaluasi, naskah yang dihasilkan berupa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2012 dan LAIKP 2012.

Sedangkan pada APBN, dari 4 naskah yang ditargetkan, dapat dicapai 5 naskah atau 125%. Pencapaian target yang melebihi angka yang ditetapkan didukung oleh penggabungan 3 Direktorat lama yang masing-masing melakukan perencanaan dan evaluasi.

Evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dalam rangkaian suatu pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, evaluasi seharusnya dilaksanakan pada semua kegiatan yang dilaksanakan, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, sehingga didapatkan rekomendasi terhadap kegiatan serupa pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan hingga pelaporannya.

### **Sasaran strategis 2:**

#### **Meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan interpretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia**

Sasaran strategis “meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ruang dan bangunan, penyajian dan interpretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia” capaian realisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Jumlah Museum Yang Direvitalisasi
2. Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi

Berikut akan diuraikan analisa capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut.

#### **1. Indikator Kinerja Jumlah Museum Yang Direvitalisasi**

Pada APBN-P, telah berhasil dilaksanakan revitalisasi 6 Museum dari 17 Museum yang ditargetkan. Penargetkan 17 museum dalam perencanaan APBN-P memang tidak tepat jika dipandang dari segi waktu. Oleh sebab itu, untuk penargetan pada tahun selanjutnya, khususnya pada APBN-P akan lebih dipertimbangkan lagi waktu yang tersedia, tidak hanya ketersediaan anggaran semata.

Perlu dijelaskan di sini bahwa, walaupun dari aspek serapan anggarannya, kegiatan telah terlaksana 100%, namun Museum tersebut belum selesai dibangun sepenuhnya, sebab pada tahun 2012 ini tahap pembangunan museum

yang dianggarkan hanya pada perencanaannya saja. Jadi, jika dievaluasi tentang kinerja anggaran tahun 2012 tercapai 100%, namun untuk bangunan fisik belum tercapai. Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun keenam museum yang perencanaannya berhasil diselesaikan pada tahun 2012 akan disampaikan lebih lengkap di bawah ini.

**a. Museum Perang Dunia (PD) II di Morotai**

Kegiatan Perencanaan Museum Perang Dunia II Morotai dilaksanakan dengan beberapa sub kegiatan yaitu:

**1) Penyusunan Masterplan Museum PD II**

Pembangunan museum di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pencanangan Gerakan Nasional Cinta Museum pada tahun 2010 silam. Daerah berlomba-lomba dalam memajukan museumnya, sehingga perkembangan museum di Indonesia tumbuh dengan signifikan. Beberapa museum unggulan perlu dibangun agar Indonesia semakin kaya dengan museum. Sebab dari museumlah masyarakat dapat menambah wawasan yang mereka miliki dengan mudah.



*Gambar Perspektif Desain Museum PD II*

Pada tahun ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah melaksanakan perencanaan pembangunan museum Perang Dunia ke-2 dengan menyusun Masterplan Museum. Diharapkan, masterplan ini akan dapat ditindaklanjuti dengan DED dan pekerjaan fisik pembangunannya pada tahun mendatang.

Kurang adanya koordinasi antara pihak ketiga dan direktorat menjadi faktor penghambat sehingga diperlukan adanya komunikasi yang lebih baik antara koordinator, penanggung jawab, tim pengadaan jasa serta koordinasi yang baik dengan pihak ketiga sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan.

## **2) Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Museum PD II Morotai**

Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Museum PD II Morotai merupakan tindak lanjut dari masterplan Museum PD II.

Kegiatan ini tidak dapat dilakukan karena masterplan belum dapat diselesaikan pada waktunya, sedangkan waktu yang tersisa dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lelang dan pelaksanaan kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, hambatan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan waktu yang sangat terbatas untuk melakukan lelang dan pelaksanaan kegiatannya sendiri. Oleh karena itu, sangat perlukan perencanaan alokasi waktu yang cukup untuk pekerjaan masterplan dan DED.

## **3) Program Publik Pengembangan Museum PD II Morotai**

Dalam rangka pengembangan Museum PD II perlu dilakukan program publik yang dapat meningkatkan kunjungan ke museum. Sebab dari museumlah masyarakat dapat menambah wawasan yang mereka miliki dengan mudah. Dengan wawasan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi lebih kreatif dan cerdas dalam menuangkan ide-ide nya. Hanya dengan ide-ide yang cemerlang pula bangsa ini akan tumbuh dan berkembang semaju negara-negara lain.

Kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan menghasilkan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Yayasan Mc Artu, Amerika Serikat.

## **4) Seminar Internasional Tradisi Budaya Pasifik**

Serangkaian dengan rencana pembangunan Museum Perang Dunia II di Morotai, maka perlu dilakukan seminar tentang tradisi dan budaya pasifik. Sebagaimana diketahui Morotai dipilih sebagai pangkalan pasukan sekutu karena lokasinya yang strategis yaitu di lingkaran pasifik. Peranan pasifik pada kenyataannya berkembang menjadi konsep masa depan dan negara-negara yang berada di kawasan ini bergerak lebih maju dari negara-negara di kawasan lainnya. Seminar ini diharapkan dapat menyajikan berbagai pemikiran tentang tradisi dan budaya pasifik.

Kegiatan Seminar Internasional Tradisi dan Budaya Pasifik di Manado, Sulawesi Utara diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2012. Narasumber berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Indonesia di Rusia, akademisi dari dalam negeri dan luar negeri. Peserta berjumlah 250 orang. Kegiatan didahului dengan pemutaran film dan diskusi di Universitas Sam ratulangi, pada tanggal 3 Desember 2012.

### **b. Museum Noken di Papua**

Noken, sebagai salah satu karya budaya warisan budaya tak benda yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, telah memiliki peran penting dalam pembangunan kebudayaan Indonesia, dengan pengakuan yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda . Pengakuan atas Noken sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO telah

menginspirasi penggalian dan revitalisasi atas nilai-nilai dan karya budaya yang unik dan khas serta berakar di berbagai daerah di Indonesia.

Mempertimbangkan eksistensi Noken sebagai warisan budaya dunia tak benda yang diakui secara internasional, dan pentingnya penghargaan serta apresiasi terhadap penggalian atas nilai-nilai dan karya budaya adiluhung yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, maka digagas pendirian dan pembangunan Museum Noken di Papua.



*Gambar perspektif bangunan Museum Noken Papua*

### **c. Museum Terapung Kapal Perang di Jakarta**

Mengingat pentingnya Perencanaan Museum Terapung Kapal Perang untuk mengangkat peran dan keunggulan Indonesia sebagai Negara Maritim, maka tersusunlah Penyusunan Masterplan Museum Terapung Kapal Perang ini.

Dalam penyusunan Masterplan Museum Terapung Kapal Perang ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyusunan masterplan yaitu melakukan pendataan dan meninjau kondisi teknis kapal perang, melakukan kajian analisis pengembangan beserta kelayakan teknis, ekonomi, dan kelembagaan Museum Kapal Perang, dan yang terakhir melakukan kajian konsep dan rencana pengembangan Museum Kapal Perang.



*Studi Banding di Monkasel (Monumen Kapal Selam), Surabaya*



Koordinasi lintas instansi pemangku kepentingan/ stakeholders (Kemenkokesra, Kemendikbud, Kemenhan, TNI AL, dan PT Pembangunan Jaya Ancol) yang tidak sederhana dan waktu pelaksanaan kegiatan studi perencanaan dan pengembangan Museum Kapal Perang yang relatif singkat adalah dua faktor yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan ini.



*Gambar perspektif masterplan Museum Terapung Kapal Perang*

Studi Penyusunan Masterplan Museum Kapal Perang perlu ditindaklanjuti dengan Detail Plan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya yaitu DED atau gambar kerja pada tahun anggaran berikutnya sehingga museum ini akan dapat terbangun secepatnya.

#### **d. Museum Presiden Indonesia di Bogor**

Presiden, sebagai salah satu sosok sentral yang memegang peran penting dalam perjalanan bangsa dan Negara Indonesia mengarungi samudera kehidupan dalam skala nasional maupun pergaulan dan eksistensi bangsa Indonesia di tingkat internasional. Atas jasa para pendiri bangsa dan pemimpin bangsa atau sosok Presiden, bangsa Indonesia mampu memproklamkan kemerdekaannya, dan membangun dasar-dasar kehidupan kenegaraan, serta keutuhan sebagai Negara kesatuan dan kesejahteraan masyarakatnya hingga saat ini.

Mempertimbangkan eksistensi Presiden sebagai sosok penting dan sentral dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dan pentingnya penghargaan serta apresiasi terhadap penggalan atas nilai-nilai dan karya para pendiri dan penerus pembangunan bangsa dan Negara Indonesia, maka digagas pendirian dan pembangunan Museum Presiden di Bogor.

Pembangunan Museum Presiden di Bogor, selain sebagai bentuk pelestarian akan kekayaan warisan budaya tak benda nasional dan dunia, juga akan berperan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan pembangunan daerah

melalui leberadaan Museum sejarah berkelas dunia tersebut, yang lebih lanjut akan memberikan nilai manfaat ekohnomi bagi masyarakat luas.

Pada tahun 2012 ini, telah selesai dilaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Museum Presiden. Diharapkan pula, pada tahun selanjutnya perencanaan tersebut dapat direalisasikan dengan pembangunan fisik atas museum tersebut.

#### e. Museum Kerinci di Jambi

Dalam rangka pelestarian kebudayaan Kerinci, pihak Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merencanakan pembangunan Museum Kerinci. Untuk mengetahui potensi budaya dan menentukan desain bangunan serta penentuan lahan lokasi pembangunan museum, maka disusunlah Masterplan dan Detail Perencanaan Museum Kerinci Jambi. Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Masterplan dan detail perencanaan Museum Kerinci ini yaitu, melakukan penataan dalam rangka perawatan terhadap peninggalan kebudayaan Kerinci, serta mewadahi peninggalan budaya tersebut dalam sebuah ruang / space yang disebut museum.

Banyak hal bersifat teknis yang harus dilakukan seperti inventarisasi kondisi eksisting yang ada, kesiapan tersebut akan sangat membantu kelancaran pembangunan dan Museum. Dalam melaksanakan semua persiapan di atas maka perlu kiranya dibentuk tim yang secara khusus mempunyai tugas dalam hal itu dan didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam kegiatan seperti ini.



*Desain Baru Museum Kerinci: Tampak Depan dan Tampak Samping*

Dalam Penyusunan Masterplan dan Detail Perencanaan Museum Kerinci ini terdapat usulan dari masyarakat Kerinci yang menginginkan museum didesain sesuai bangunan tradisional yang merepresentasikan ciri masyarakat Kerinci dengan atap tumpang mengadopsi Masjid Agung Kerinci. Akan tetapi dari sisi arkeologis dan arsitektur, bangunan atap tumpang bukan ciri asli masyarakat asli Kerinci. Adanya usulan dalam rapat pembahasan tersebut perlu perencanaan desain bangunan yang minimalis yang menyesuaikan anggaran yang disediakan, sehingga terjadi perubahan total terhadap desain interior dan arsitektur bangunan.

Pembangunan museum mendapatkan respon yang sangat positif dari semua stake holder di daerah, sehingga diharapkan untuk ke depannya bisa lebih banyak lagi perencanaan pembangunan museum di setiap daerah.

**f. Museum Manusia Mini *Homo floresiensis* di Nusa Tenggara Timur**

Pembangunan Museum *Homo floresiensis* di Flores, selain sebagai bentuk pelestarian artefak dan sejarah antropologi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, juga akan berperan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan pembangunan daerah melalui keberadaan Museum sejarah berkelas dunia tersebut, yang lebih lanjut akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat luas.

Manusia Mini *Homo floresiensis* merupakan salah satu temuan antropologi yang sangat penting dalam sejarah evolusi dan peradaban manusia, yang ditemukan di Indonesia, khususnya di Flores. Temuan penting tersebut telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan teori evolusi dan sejarah peradaban manusia yang terus mendapatkan perhatian dan diskusi dari kalangan antropolog maupun ilmu palaeantropologi dunia.



*Gambar perspektif bangunan Museum Homo floresiensis*

Mempertimbangkan eksistensi *Floresiensis* sebagai jejak penting evolusi dan peradaban manusia yang telah mendapatkan perhatian internasional, dan pentingnya mendorong eksplorasi lebih lanjut atas penelitian antropologi dan kebudayaan di Indonesia, khususnya di Flores dan sekitarnya, maka digagas pendirian dan pembangunan Museum *Homo floresiensis* di Flores.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Museum Manusia Mini *Homo floresiensis* di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah selesai dikerjakan pada tahun 2012 dan bisa dijadikan pedoman dalam pekerjaan pembangunan fisiknya di masa yang akan datang.

Perlu juga disampaikan, bahwa untuk APBN 2012, Direktorat PCBM menargetkan 1 revitalisasi Museum dan dapat terlaksana. Kegiatan revitalisasi tersebut adalah Perencanaan Museum Manokwari. Hasil dari penyusunan Masterplan adalah penyiapan rancangan kompleks Museum Manokwari baik tata bangunan, tata lingkungan dan keterkaitan dengan potensi pendidikan dan kepariwisataan lainnya di Kabupaten Manokwari.



Selanjutnya bangunan museum ini diharapkan bisa mengakomodasi pelestarian sejarah dan budaya yang ada di Papua Barat



*Gambar Perspektif Masterplan Museum Manokwari*

#### **Revitalisasi Museum di Daerah Melalui Dana Tugas Pembantuan (TP)**

Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PCBM, terdapat juga kegiatan revitalisasi Museum yang dilakukan oleh 12 Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dari 12 Dinas yang melaksanakan revitalisasi museum, hanya 6 Dinas yang berhasil melaksanakan revitalisasi museum sampai tahap pekerjaan fisik. Sedangkan 3 Dinas hanya mampu melaksanakan sampai perencanaan saja, dan 3 Dinas gagal melaksanakan kegiatan. Laporan capaian sasaran dan keuangan revitalisasi masing-masing revitalisasi museum di daerah dilaporkan dalam laporan akuntabilitas pemerintah daerah masing-masing.

Adapun Museum yang direvitalisasi pada APBN 2012 di Daerah dan Dinas yang menangani adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. Pelaksanaan Revitalisasi Museum di Daerah*

No	Nama Museum	Dana (Milyar)	Hasil	Dinas
1	Subak, Tabanan, Bali	1	Selesai	Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan
2	Asmat, TMII, Jakarta	1	Selesai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
3	Bekon Blewut, NTT	1	Selesai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT
4	Satria Mandala, Jakarta	1	Selesai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov DKI Jakarta
5	Asimbojo, Bima, NTB	0,5	Selesai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB
6	Batik, Pekalongan	2	Selesai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekalongan

7	Tosan Aji, Purworejo	1	Perencanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
8	Radya Pustaka, Solo	1	Perencanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
9	Kota Makassar, Sulsel	1	Perencanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar
10	Tanjung Pinang, Kepri	1	Gagal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang
10	Cakrabuana Cirebon, Jabar, Jabar	1	Gagal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
12	Geusan Ulun, Sumedang, Jabar	1	Gagal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang

## 2. Indikator Kinerja Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi

Pada APBN-P, target Jumlah koleksi museum yang didokumentasi sebanyak 50.000 koleksi tidak dapat tercapai sama sekali (0%), sebab sistem yang digunakan untuk pendokumentasian tersebut juga belum sempurna dan waktu untuk melaksanakan kegiatan pendokumentasian yang tidak mencukupi. Sedangkan pada APBN tidak ada kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator ini.

## Kegiatan Lain yang Dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selain telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti yang telah dijelaskan di atas, juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat, namun tidak masuk dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan sehingga tidak bisa dimasukkan dalam tabel Rencana Kegiatan Tahunan maupun Tabel Pencapaian Sasaran. Adapun kegiatan yang dimaksud akan diuraikan secara lebih detail di bawah ini.

### 1. Pemfasilitasian Cagar Budaya

Cagar Budaya yang difasilitasi oleh Direktorat pelestarian Cagara Budaya dan Permuseuman pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

#### a. Pembuatan Patung Perunggu Mansinam

Patung Perunggu Mansinam di Manokwari telah selesai dikerjakan 100%. Patung ini berupa patung Perunggu yang menggambarkan sosok Yesus Kristus dengan tinggi patung 15 meter dan panjang dari tangan ke tangan 14,2 meter. Patung dikerjakan oleh seniman dari Yogyakarta yaitu Bapak Yusman, dan dikirimkan ke Mansinam menggunakan kapal laut. Patung yang dikirim masih berupa lempengan-lempengan perunggu dan direkonstruksi kembali di Mansinam.



*Patung perunggu Mansinam dan penopangnya*

## b. Pelestarian Situs Bersejarah Bung Karno di Ende



*Gambar Perspektif Masterplan Situs Bersejarah Bung Karno di Ende*

Kegiatan Pelestarian Situs Bersejarah Bung Karno di Ende yang telah berhasil dilaksanakan adalah:

- 1) Diseminasi Masterplan pelestarian kawasan bersejarah Bung Karno Ende  
Kegiatan ini berupa sosialisasi untuk menjangkau masukan dari masterplan pelestarian kawasan bersejarah Bung Karno Ende yang telah disusun.
- 2) Penyusunan DED dan maket pelestarian situs bersejarah Bung Karno Ende  
Telah berhasil disusun sebuah DED atas pelestarian situs bersejarah Bung Karno di Ende. Perencanaan dan desain gambar cagar budaya yang diprioritaskan dalam penyusunan DED adalah:

- a) Pemodelan kawasan bersejarah Bung Karno di Ende
  - b) Perencanaan dan desain kawasan bersejarah Bung Karno
  - c) Perencanaan dan desain bangunan cagar budaya dalam situs kawasan
  - d) Perencanaan dan desain saluran drainase bangunan termasuk koridor penghubung
  - e) Perencanaan dan desain mekanika/elektrikal pada tiap bangunan
- 3) Diseminasi dan program publik revitalisasi nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal Ende Flores.

Untuk Desiminasi dan program publik ini dilaksanakan dalam bentuk pameran-pameran yang diselenggarakan di Jakarta.

Selain Pembuatan Masterplan dan DED, di kawasan bersejarah ini juga rencananya dikerjakan pekerjaan fisik, yaitu Pembangunan Rumah Budaya dan Koridor Sejarah Kota Ende dan Pemugaran makam Ibu Amsi. Namun, karena waktu yang dianggap tidak mencukupi, maka pekerjaan fisik 2 Cagar Budaya ini tidak jadi dilaksanakan.

### c. Pembangunan Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan monumen PDRI, telah dilaksanakan tahapan kegiatan-kegiatan, yaitu:

- 1) Sosialisasi publik pembangunan monumen PDRI
- 2) Sayembara penyusunan Masterplan PDRI

Pemenang dari sayembara pembuatan monumen PDRI menjadi acuan dari pembuatan masterplan dan DED dari monumen tersebut.



Gambar desain Pemenang Sayembara Pembangunan Museum Kerinci

- 3) Penyusunan masterplan, DED, pembuatan maket kawasan PDRI



Penyusunan masterplan dan DED Monumen PDRI telah selesai dilaksanakan. Masterplan dan DED ini akan dijadikan acuan dalam pembangunan fisik monumen PDRI di tahun anggaran selanjutnya

#### d. Revitalisasi Kawasan Keraton Cirebon

Kegiatan Revitalisasi Kawasan Keraton Cirebon yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah Penyusunan masterplan dan DED kawasan keraton Cirebon. Masterplan Kawasan Cirebon telah berhasil disusun dengan baik. Masterplan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, untuk penyusunan DED kawasan belum bisa diselesaikan, sebab waktu tidak mencukupi. Untuk menyusun DED harus ada masterplan sebagai acuannya, sedangkan masterplan baru selesai dibuat ketika tahun anggran telah selesai.



*Salah satu bagian masterplan pengembangan kawasan Keraton Cirebon*

Pada tahun ini juga telah dilakukan pekerjaan revitalisasi dua Cagar Budaya dalam kawasan Keraton Cirebon, yaitu Revitalisasi Keraton Kasepuhan dan Makam Astana Gunung Jati. Pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Barat, sehingga DIPA dan pelaporan akuntabilitasnya dibuat oleh Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## 2. Event Cagar Budaya dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat

Kegiatan Event Cagar Budaya dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Gelar Museum Nusantara

Gelar Museum Nusantara merupakan kegiatan pameran bersama yang diikuti oleh seluruh museum di 33 Provinsi yang bertujuan untuk menampilkan museum kepada publik dengan warna yang berbeda agar dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum. Banyaknya Museum yang berpartisipasi pada pameran ini berjumlah 126 museum. Partisipasi juga berupa penyajian koleksi dan alat-alat publikasi seperti leaflet karena keterbatasannya untuk menampilkan koleksi.

Dalam melaksanakan kegiatan Gelar Museum Nusantara ini, terdapat batu sandungan yang dihadapi di antaranya waktu persiapan yang begitu pendek, serta pelaksana oleh pihak ketiga yang kurang memahami pameran museum yang merupakan pameran khusus. Untuk mencegah hal yang sama terjadi pada pergelaran Gelar Museum Nusantara di masa mendatang, maka perencanaan harus disempurnakan, serta sebaiknya subkegiatannya tidak seluruhnya dipaketkan ke pihak ketiga.



*Peresmian Gelar Museum Nusantara oleh Ibu Wakil Menteri Kebudayaan*



*Suasana Pameran*



## b. Pemilihan Duta Museum 2012

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (eks. Direktorat Museum) pada tahun 2011 telah menyelenggarakan Pemilihan Duta Museum dari *Public Figure*, dan terpilihlah Sigi Wimala sebagai Duta Museum Nasional. Sebagai tindak lanjut dan kontinuitas dalam kegiatan ini, diperlukan sebuah gerakan nyata dalam bentuk aktivitas Pemilihan Duta Museum Daerah yang berfungsi sebagai wakil pendamping Duta Museum yang telah ada untuk aktif dalam dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di museum dalam rangka pencitraan museum ke masyarakat dan sekaligus mencari Duta-Duta Museum dari daerah.



*Malam inaugurasi duta museum 2012 dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*

Atas dasar sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang telah menetapkan sebuah program pada tahun 2012 ini menitik beratkan pada sosialisasi dan kampanye publik tentang museum yang bertujuan untuk mencari Duta-Duta Museum dari daerah di seluruh Provinsi Indonesia dalam rangka membantu Duta Museum untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan gerakan nasional masyarakat Indonesia untuk mencintai museum.



*65 Duta Museum 2012 dari seluruh Provinsi yang telah terpilih berfoto bersama di depan Istana Negara, Bogor*



Sasaran program Pemilihan Duta Museum Daerah dalam rangka mensosialisasikan dan kampanye ini adalah terpilihnya pasangan Duta Museum Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia yang akan turut mendorong terbangunnya paradigma baru tentang peran dan fungsi museum, dengan menjadikan Putra Putri Daerah sebagai ujung tombak akan pencitraan museum dimasa mendatang maupun sebagai ajang edukasi dan kompetisi gobal. Pada tahun ini telah terpilih 65 Duta Museum yang berasal dari 33 Provisnsi di Indonesia

**c. Pemasyarakatan Museum Melalui Media**

Saat ini kesadaran masyarakat berkunjung ke museum masih dinilai rendah. Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum, diperlukan sosialisasi tentang museum. Sosialisasi ini telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dilaksanakannya program *Visit Museum Year* serta Gerakan Nasional Cinta Museum. Media kampanye ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan kampanye publik tentang museum melalui media.

Pemasyarakatan Museum Melalui Media memiliki tujuan dan saran yang akan dicapai demi terciptanya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Melalui Pemasyarakatan Museum Melalui Media ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan serta memupuk rasa cinta museum di kalangan masyarakat melalui media elektronik seperti televisi dan radio sehingga dapat membangun komunikasi aktif antara museum dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan adalah berupa produksi dan penayangan film dokumenter tentang permuseuman di media televisi, program talkshow di media televisi dan radio, iklan layanan masyarakat di televisi dan radio. Hasil kegiatan diwujudkan dalam bentuk naskah produksi, materi penayangan dan bukti penayangan.

Dalam melaksanakan usaha pemasyarakatan Museum Melalui Media, terjadi suatu hambatan. Dikarenakan keterbatasan waktu, menyebabkan koordinasi antar pihak yang dilibatkan kurang optimal. Untuk mengatasi keterhambatan yang terjadi, maka diperlukan suatu usaha, yaitu diperlukannya jadwal dan alokasi waktu yang jelas dan pasti terutama yang berkaitan dengan keterlibatan pihak luar atau narasumber.

**d. Ekshibisi Nilai Budaya Melalui Fotografi Bertemakan Kearifan Lokal**

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman cagar budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir setiap sudut wilayah memiliki cagar budaya yang unik, elstis dan mengandung nilai sejarah yang tinggi. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melestarikan semua cagar budaya tersebut dengan sebaik-baiknya dengan berbagai cara.



*Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman meresmikan Eksibisi sekaligus meninjau foto-foto yang dipamerkan*

Salah satu caranya dengan melibatkan unsur masyarakat dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan cagar budayanya di daerah masing-masing. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan turut membantu pemerintah dalam menjaga dan melestarikan serta mencintai budaya Indonesia. Sebagai salah satu cara dalam melibatkan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya adalah dengan adanya kompetisi atau sayembara fotografi. Terkait dengan hal tersebut dilaksanakanlah lomba fotografi yang terbuka untuk masyarakat umum berkaitan dengan cagar budaya yang berada di sekitar kita.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya yang Dilestarikan melalui media fotografi, memberikan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kepada masyarakat melalui media pameran yang dipublikasikan melalui media elektronik dan media cetak, meningkatkan dan memupuk rasa cinta dikalangan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta membangun kesadaran bersama untuk melestarikan warisan budaya Indonesia.

Sejak tanggal 1-30 November 2012 telah diselenggarakan lomba fotografi cagar budaya yang diikuti oleh para jurnalistik dan masyarakat umum. Dalam kegiatan lomba fotografi budaya ini diikuti oleh 811 peserta terdiri dari 680 peserta umum dari 20 provinsi dan 131 peserta jurnalistik dari 70 media. Dan dari hasil lomba tersebut terkumpul sebanyak 2.648 foto, terdiri dari 2.185 foto kategori umum dan 463 foto jurnalistik. Terseleksi 150 foto yang dipamerkan dan 10 orang pemenang terdiri dari 5 orang kategori umum dan 5 orang kategori jurnalistik.

Untuk kegiatan dimasa mendatang akan terus diupayakan untuk lebih sering mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dengan berbagai tema, mengingat masyarakat mempunyai andil yang besar dalam usaha pelestarian cagar budaya.

Satu-satunya kegiatan yang tidak dapat terlaksana untuk mendukung output Event Cagar Budaya dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat adalah **Pembukaan Galeri Fotografi di Galeri Nasional**. Kegiatan ini tidak dapat terlaksana, sebab anggarannya diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, sebenarnya kegiatan ini bukan merupakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,

namun tugas dan fungsi dari Galeri Nasional yang merupakan UPT di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mencapai target yang ditetapkan, diperlukan suatu anggaran yang telah diestimasi untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Dalam istilah lain, realisasi anggaran biasa disebut dengan daya serap anggaran. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya. Apabila capaian target berbeda jauh, baik lebih maupun kurang dibandingkan dengan daya serapnya, maka bisa dikatakan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh sebab itu, hasil laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi jika dibandingkan dengan waktu yang ditempuh. Dengan anggaran (APBNP) sebesar Rp.133.650.000.000; Direktorat dituntut untuk menyelesaikan kegiatannya dalam waktu kurang lebih 4 bulan saja. Sedangkan pada APBN, Direktorat memiliki anggaran hanya kurang dari 1/5 anggaran APBNP yang merupakan gabungan 3 Direktorat lama. Sehingga dapat dipahami bahwa daya serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada APBNP hanya 52,75%. Berikut tabel daya serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman APBNP 2012:

Tabel 5. Daya Serap APBNP 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp. (ribu)	%	Rp. (ribu)	%
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	133.650.000	70.502.000	52,75	63.147.904	47,25

Akuntabilitas keuangan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diuraikan di bawah ini.

- A. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Serta Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Dan Ditetapkan Secara Nasional

Pada APBN-P anggaran yang yang disediakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- tidak terserap sama sekali atau 0%. Penyebabnya adalah karena tidak

terlaksananya satu pun kegiatan yang mendukung IKK ini. Hal ini sangat wajar dan dapat dimaklumi. Sedangkan pada APBN, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan dapat diserap sebesar Rp. 1.617.405.000,- atau 95,1%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab hasil kinerjanya lebih dari 100%.

## **2. Jumlah Cagar Budaya yang Didokumentasikan**

Pada APBN-P, untuk IKK ini tidak disediakan anggaran sama sekali atau Rp. 0,- karena tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk mendukungnya. Sedangkan pada APBN, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 250.000.000,- dan dapat terserap 92,3% atau sebesar Rp. 230.756.000,-. Penyerapan ini termasuk tinggi, sebab realisasi kinerjanya pun juga sangat tinggi, yaitu 256,1%. Pengalokasian anggaran untuk IKK ini dapat dinilai sangat efektif .

## **3. Jumlah Cagar Budaya Bawah Air yang Dieksplorasi**

Pada APBN-P, sama dengan IKK sebelumnya, bahwa tidak ada anggaran yang tersedia, sehingga walaupun dalam tabel realisasinya tertulis 0, tidak berarti realisasi anggarannya adalah 0%. Sedangkan pada APBN, penyerapan anggarannya sangat tinggi, yaitu 93,8%. Dari anggaran sebesar Rp. 726.474.000,- telah terserap sebesar Rp. 681.780.000,-. Penyerapan ini juga sangat efektif bila dibandingkan dengan realisasi kinerjanya yang mencapai 100%.

## **4. Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum**

Pada APBN-P tidak ada anggaran yang mendukung tercapainya sasaran yang ditargetkan, sehingga penyerapan anggarannya pun tidak ada. Sedangkan pada APBN, anggaran untuk mendukung pencapaian sebesar Rp. 950.000.000,- terserap Rp. 645.428.000,- atau sebesar 58,9%. Penyerapan ini cukup efektif apabila dibandingkan dengan realisasi kinerjanya, yaitu sebesar 57%.

## **5. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**

Pada APBN-P anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000.000,- dan hanya berhasil diserap sebesar Rp. 132.475.000,- atau 10%. Sedangkan untuk realisasi kerjanya, penyerapannya lebih besar, yaitu 67%. Pada APBN, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.040.589.000,- dan berhasil diserap sebesar Rp. 613.382.700,- atau sebesar 58,9%. Penyerapan ini sangat efektif sebab kurang dari realisasi kinerja yang dicapai yaitu 125%.

- B. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Pengembangan Kualitas Fisik Fasilitas/ Ruang dan Bangunan, Penyajian dan Interpretasi, Pengelolaan Serta Pelayanan Museum di Indonesia** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Jumlah Museum Yang Direvitalisasi

Pada APBNP, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.000.000.000,- dan dapat terserap Rp. 9.821.3129.000,- atau sebesar 45%. Sedangkan pencapaiannya kinerjanya sebesar 35%. Penyerapan ini dapat dikatakan cukup efektif, mengingat waktu yang dialokasikan untuk revitalisasi ini sangat pendek, hanya sekitar 3 bulan. Perlu disampaikan pula bahwa revitalisasi yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan pembangunan museum yang kegiatannya dituangkan dalam penyusunan Masterplan dan DED, bukan pekerjaan fisiknya. Sedangkan pada APBN, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan terserap Rp. 922.773.500,- atau sebesar 92,3%. Penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab penyerapan kinerjanya sebesar 100%.

## 2. Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi

Pada APBN-P, anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan tidak dapat terserap sama sekali atau 0%. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah waktu yang dialokasikan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan mengingat banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Sedangkan pada APBN, tidak ada anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini.

Anggaran APBN tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah anggaran dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dimiliki 3 Direktorat lama, yaitu Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, Direktorat Tinggalan Purbakala, dan Direktorat Museum. Adapun akuntabilitask keuangan dari masing-masing Direktorat lama tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Daya Serap APBN 2012 Tiga Direktorat Lama

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp. (ribu)	%	Rp. (ribu)	%
Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial	5.470.000	4.228.109	77,3	1.241.890	22,7
Direktorat Tinggalan Purbakala	11.900.000	7.388.119	62,1	5.567.650	37,9
Direktorat Museum	5.854.748	4.817.301	82,3	1.037.446	17,7

Dapat disampaikan pula bahwa penggabungan 3 Direktorat Lama terjadi pada pertengahan tahun anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatannya pun sebagian masih dilaksanakan oleh pegawai masing-masing Direktorat, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pengeluaran. Oleh sebab itu, laporan Kinerja dan Daya Serap keuangannya dibuat oleh masing-masing PPK dan bendahara masing-masing Direktorat lama.

Dapat dilihat dalam tabel, bahwa masing-masing Direktorat memiliki akuntabilitas keuangan yang berbeda-beda. Namun apabila dijumlah, total anggaran Direktorat PCBM adalah Rp. 23.224.748.000,- dan penyerapan anggarannya sebesar Rp.16.433.529.000,- atau sebesar 70,8%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran untuk APBN cukup tinggi bila dibandingkan dengan penyerapan APBN-P yang hanya sebesar 52,75%. Hal ini dapat dipahami sebab untuk pelaksanaan APBN-P waktu yang digunakan hanya 3 bulan efektif dibandingkan dengan APBN yang memiliki waktu efektif 12 bulan.



## **BAB. IV. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya selama tahun anggaran 2012. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2012 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Secara umum kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2012 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran tahun 2012 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran. Namun beberapa Indikator Kinerja Kegiatannya tidak dapat terpenuhi realisasinya, baik kinerja maupun keuangannya. Hal ini disebabkan terutama karena keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan perpindahan instansi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **2. REKOMENDASI DAN SARAN**

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman perlu ditingkatkan lagi, sebab dengan bergabungnya Kebudayaan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan yang direncanakan lebih banyak dan beragam. Selain itu anggaran yang dialokasikan jauh lebih besar dibandingkan dengan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu untuk merealisasikannya diperlukan SDM yang dinamis, kompeten, dan mempunyai visi membangun kebudayaan yang maju di Negara ini. Rekomendasi khusus yang dapat disampaikan pula adalah untuk pekerjaan fisik yang banyak dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebaiknya direncanakan dalam tahun anggaran normal, bukan dalam anggaran perubahan, sehingga hasil yang dicapai akan menjadi lebih optimal dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.